



**PIDATO MENTERI KEUANGAN**

**POKOK-POKOK**

**KETERANGAN PEMERINTAH**

**MENGENAI**

**RANCANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS**

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



REPUBLIK INDONESIA

**POKOK-POKOK KETERANGAN PEMERINTAH  
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2020  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
15 JULI 2021**

---

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,***

***Shalom, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,***

***Om Swastiastu,***

***Namo Buddhaya,***

***Salam Kebajikan,***

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan, sehingga kita semua dapat hadir, baik secara fisik maupun virtual, dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini. Sampai dengan hari ini, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang telah melanda berbagai negara di dunia sejak awal tahun 2020. Kita telah menyaksikan gelombang kenaikan kasus yang luar biasa sehingga mengancam kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan serta menciptakan tekanan sosial dan dampak negatif bagi masyarakat. Marilah kita bersama terus memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi ini dapat segera berakhir.

## **Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pada hari ini, di tengah dinamika dan ketidakpastian yang semakin meningkat, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2020. Dokumen ini merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RUU P2 APBN tahun 2020 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, serta UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2020 kembali mendapatkan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Opini WTP atas LKPP Tahun 2020 diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Kinerja APBN yang baik diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia maupun negara lain di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 sebagai isu sentral di tahun 2020 memiliki dampak yang luar biasa, yang tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian, menurunkan kesejahteraan rakyat dan berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Pemerintah merespon kondisi tersebut dengan mengambil langkah *extraordinary*, memberikan stimulus ekonomi dan keuangan dalam merespon kejadian tak terduga ini. Kebijakan tersebut utamanya diarahkan untuk menangani

dampak kesehatan dari pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah bergerak cepat dengan menjalankan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang termasuk di dalamnya adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Bank Indonesia dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus melalui skema *burden sharing*. SBN ini terutama digunakan untuk pendanaan klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dukungan kepada UMKM dan untuk pembiayaan korporasi, serta secara khusus untuk pencadangan pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menjadi minus 2,07 persen dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Asian Development Outlook pada April 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada angka minus 4,0 persen. Sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, moneter dan sektoral telah dapat meminimalkan dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020, angka Produk Domestik Bruto tahun 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun, atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp15.833,9 triliun.

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan menurunnya tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak relatif rendah sebesar 1,68 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Selama tahun 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai Rp14.577/USD, atau cenderung sedikit melemah jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 sebesar Rp14.146/USD. Kembali stabilnya volatilitas pasar keuangan yang mendorong pulihnya aliran modal ke pasar keuangan domestik, peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksinasi di dalam negeri menjadi

sentimen positif pasar keuangan domestik yang berkontribusi positif menopang nilai tukar rupiah.

Meskipun nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2020 tetap tinggi, yaitu sebesar USD135,9 miliar. Hal tersebut lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019, yaitu sebesar USD129,18 miliar. Nilai cadangan devisa pada akhir tahun 2020 tersebut ekuivalen dengan pembiayaan 10,2 bulan impor yang berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan dalam situasi Pandemi, Akumulasi Neraca Perdagangan tahun 2020 tercatat mengalami surplus sebesar USD21,74 miliar, atau meningkat signifikan dibanding neraca perdagangan tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar USD3,59 miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit Neraca Perdagangan migas. Kinerja Neraca Perdagangan sepanjang tahun 2020 tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Selain berdampak terhadap kinerja fundamental ekonomi Indonesia, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di tahun 2020. Perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat yang selama ini berhasil dicapai oleh Pemerintah, kembali menghadapi tantangan besar akibat kontraksi ekonomi. Pemerintah berupaya keras melalui instrumen APBN untuk menahan dampak negatif pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat agar tidak turun lebih dalam. Melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terutama melalui perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan dunia usaha untuk dapat bertahan dan kembali bangkit dari dampak pandemi.

Program Perlindungan Sosial PC-PEN pada tahun 2020 mampu menahan laju kenaikan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level mencapai 7,07 persen meskipun meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,23 persen. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang dapat kita jaga tidak lebih dari 10,19 persen pada tahun 2020 meskipun meningkat dari capaian di tahun 2019 yang dapat kita tekan sampai dengan 9,22 persen. Di sisi lain, dampak pandemi

juga mengakibatkan Rasio Gini sedikit meningkat menjadi 0,385, dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,380. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 dapat ditingkatkan mencapai angka 71,94 dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,92.

Kinerja positif atas pelaksanaan Program PC-PEN tahun 2020, juga didukung oleh hasil survey dari berbagai Lembaga, baik internal Pemerintah (berbagai Kementerian termasuk TNP2K) maupun eksternal, seperti Worldbank, Prospera, LPEM FEB UI, dan Lembaga Demografi. Berdasarkan survey tersebut, program perlindungan sosial dinilai efektif menahan pemburukan serta menjaga daya tahan dan *survival* di tengah tekanan. Ketepatan sasaran dinilai membaik, dengan terjadinya peningkatan inklusi keuangan penerima, adanya peningkatan kompetensi melalui program prakerja, serta bantuan subsidi kuota dan diskon listrik yang dapat dimanfaatkan dengan baik.

Efektivitas program terkait dukungan UMKM juga dinilai mampu membuat penerima bertahan selama pandemi. Program penempatan dana berhasil menahan penurunan omzet UMKM, bahkan terdapat UMKM yang omzet dan keuntungannya meningkat. Bantuan Pelaku Usaha Mikro efektif berfungsi sebagai *cash buffer*, karena 60 persen penerima tidak memiliki cadangan kas lebih dari 10 hari, dan pemanfaatannya optimal, baik untuk bahan baku dan sewa alat produksi.

Di sisi lain, berbagai program insentif perpajakan juga membantu tidak hanya usaha kecil dan mikro, namun juga kelompok usaha besar terutama dalam menjaga *cash flow* di tengah tekanan penurunan omset sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat ditekan. Insentif perpajakan telah dimanfaatkan dan membantu meningkatkan daya beli, serta membantu likuiditas dan kelangsungan usaha. Lebih lanjut, survey menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan didominasi oleh wajib pajak yang paling terdampak pandemi, yaitu 47 persen sektor perdagangan, 19 persen sektor industri pengolahan, dan 7 persen sektor konstruksi.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2020 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas: Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Ringkasan dari masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dalam Laporan Realisasi APBN TA 2020, dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. Pendapatan Negara TA 2020 tersebut menurun Rp312,8 triliun atau 15,9 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Realisasi Pendapatan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp343,8 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp18,8 triliun.

Belanja negara baik dalam bentuk belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa, memiliki peran cukup besar dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pada TA 2020, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari anggaran belanja pada APBN TA 2020, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,9 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762,5 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp286,1 triliun atau 12,3 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2019.

Berbagai hasil pembangunan dari belanja negara, secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai bidang. Pada bidang infrastruktur antara lain, telah dicapai pembangunan jaringan irigasi sepanjang 280,84 kilometer, pembangunan jalan baru sepanjang 280,18 kilometer, jembatan sepanjang 7.669,6 meter, rel kereta api sepanjang 452,3 kilometer, pemasangan jaringan gas sebanyak 135.286 sambungan rumah di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan. Pada bidang pendidikan antara lain berupa penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 16,18 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 845,36 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama bagi 8,72 juta siswa, subsidi kuota internet sebanyak 35,6 juta penerima melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 6,7 juta penerima melalui Kementerian Agama.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, Pemerintah juga telah menyalurkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) kepada 96,7 juta jiwa, bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) kepada 53 juta jiwa, insentif nakes pusat kepada 684 ribu nakes, dan pembayaran penanganan 183,9 ribu pasien Covid-19. Sedangkan pada bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, Bantuan Subsidi

Gaji/Upah kepada 12,4 juta karyawan, 2,0 juta guru honorer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 619 ribu guru honorer Kementerian Agama, dan Kartu Prakerja kepada 5,5 juta penerima serta diskon tarif listrik kepada 32,1 juta rumah tangga penerima.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, Defisit APBN TA 2020 tercatat sebesar Rp947,6 triliun. Defisit anggaran tersebut didanai dengan Pembiayaan (neto) sebesar Rp1.193,2 triliun, yang berasal dari Pembiayaan Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1.146,8 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar Rp46,4 triliun, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2020 sebesar Rp245,6 triliun. Defisit APBN direalisasikan untuk mendukung kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan *countercyclical*. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan defisit secara optimal, sehingga peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik, kredibel, dan efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan fiskal secara nasional.

#### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dijelaskan bahwa SAL Awal TA 2020 adalah sebesar Rp212,7 triliun. Pada tahun 2020, terdapat penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun, serta penyesuaian SAL sebesar Rp0,4 triliun, sehingga Saldo Akhir SAL TA 2020 adalah sebesar Rp388,1 triliun.

Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2020, yang terdiri dari Aset sebesar Rp11.098,6 triliun, Kewajiban sebesar Rp6.625,4 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp4.473,2 triliun. Terdapat peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2020 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto, yang digunakan terutama untuk mendanai pelaksanaan Program PC-PEN dan kegiatan prioritas lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Laporan Operasional (LO) Tahun 2020 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional sebesar Rp1.783,2 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp2.601,1 triliun, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817,9 triliun. Disamping itu, terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,7 triliun, sehingga membentuk Defisit Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp872,6 triliun.

Laporan Arus Kas Tahun 2020 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2020. Arus kas bersih dari



Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757,0 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298,6 triliun, dan arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301,2 triliun, serta arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp25,0 triliun. Arus kas bersih Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat kami sampaikan bahwa Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp5.127,3 triliun. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional sebesar Rp872,6 triliun, Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218,9 triliun, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,4 triliun, maka Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.473,2 triliun.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2020. Program PC-PEN dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun, yang dikelompokkan ke dalam enam klaster yaitu (1) klaster Kesehatan, (2) klaster Perlindungan Sosial, (3) klaster Dukungan UMKM, (4) klaster Pembiayaan Korporasi, (5) klaster Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta (6) klaster Insentif Usaha. Pemerintah telah berupaya keras agar pelaksanaan dan pencapaian target output dan tujuan program PEN dalam TA 2020 seluruhnya dapat terlaksana dengan tata kelola yang baik.

Realisasi program PC-PEN Tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun, atau 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun. Program PC-PEN terutama diprioritaskan selain untuk menjaga kesehatan, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, serta membantu dunia usaha termasuk UMKM. Program PEN telah terealisasi pada klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp216,6 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun.

### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020, terdapat beberapa temuan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan. Terdapat 26 temuan pemeriksaan dan 75 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah dan dilaporkan progres penyelesaiannya secara berkala. Meskipun temuan pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2020, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah atas rekomendasi BPK tersebut, antara lain adalah:

1. Atas temuan pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak dan kewajiban negara sesuai prinsip basis akrual, Pemerintah telah dan akan terus mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan dan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengenai kesesuaian kebijakan akuntansi di bidang perpajakan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Berkenaan dengan temuan terkait pertanggungjawaban atas kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah akan menyempurnakan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19, dan penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
3. Terhadap temuan terkait insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN, Pemerintah akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengajuan insentif pada situs resmi perpajakan, mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi, penyajian dalam laporan keuangan pemerintah dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas perpajakan.
4. Terkait dengan temuan pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN, Pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
5. Terkait dengan temuan penyaluran belanja subsidi Bunga KUR dan Non KUR serta Belanja Lain-lain kartu prakerja dalam rangka PC-PEN, Pemerintah akan menyusun ketentuan mengenai pengelolaan rekening penampungan sisa dana belanja subsidi bunga/margin KUR dan Subsidi bunga/margin Non KUR serta belanja lain – lain kartu prakerja.
6. Terhadap temuan realisasi pembiayaan tahun 2020 dalam rangka PC-PEN yang tidak dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima

akhir, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan regulasi, pengaturan, sistem dan kebijakan akuntansi mengenai hak dan kewajiban perseroan pengelola dalam mengelola penerusan pinjaman PEN kepada Pemerintah Daerah, melalui *addendum* Perjanjian antara Pemerintah dan perseroan terkait.

7. Atas temuan terkait penatausahaan piutang pajak, Pemerintah akan memutakhirkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Modul *Revenue Accounting System* (RAS) sesuai peraturan terbaru, terutama terkait dengan penyesuaian tarif bunga/sanksi administrasi dalam ketentuan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cluster Perpajakan.
8. Berkaitan dengan temuan Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021, Pemerintah akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi atas kegiatan yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya.
9. Terhadap temuan Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun, Pemerintah telah menetapkan protokol penunjukan aktuaris dan persetujuan penggunaan metode dan asumsi untuk menghitung kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun.

#### **Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian antara Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2020 terdapat 84 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 2 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Pada tahun ini, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini WTP atas LKBUN Tahun 2020 merupakan opini WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut atau sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat dan senantiasa berupaya keras menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Namun demikian, Pemerintah tidak berhenti hanya pada pencapaian opini atas laporan keuangan, namun secara konsisten dan terus menerus berupaya agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Demikianlah Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 yang tertuang dalam RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pada situasi pandemi ini, Pemerintah mengharapkan dukungan dari DPR maupun seluruh komponen masyarakat, semoga kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Pemerintah juga mengharapkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Pemerintah dan DPR dapat terus ditingkatkan sehingga tugas kenegaraan yang diamanatkan kepada kita dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita dalam meningkatkan kualitas APBN, guna mencapai cita-cita nasional dan tujuan bernegara, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Sekian dan terima kasih,

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,***

***Shalom,***

***Om Shanti Shanti Shanti Om,***

***Namo Buddhaya,***

***Salam Sehat untuk kita semua.***

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia**

**Menteri Keuangan**

**ttd**

**Sri Mulyani Indrawati**